



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

PEMBATALAN AKTA PERUBAHAN YAYASAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN STUDI  
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NO. 527PK/PDT/2014 TERHADAP YAYASAN PANCA BHAKTI DI SULAWESI TENGAH

AGRINISARI PUTIKA, Hariyanto, S.H., M.Kn

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

## INTISARI

**PEMBATALAN AKTA PERUBAHAN  
YAYASAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 527 PK/PDT/2014  
TERHADAP YAYASAN PANCA BHAKTI DI SULAWESI TENGAH)**

Oleh : Agrinisari Putika<sup>1</sup> dan Hariyanto<sup>2</sup>

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui Akibat hukum dari Penerbitan akta Pendirian Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perubahan Yayasan Nomor 02 Tahun 2004 yang dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 527 PK/Pdt/2014.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan jalan penelitian kepustakaan dimana mengkaji dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang sudah terkumpul dianalisa dengan metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dimana menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian bukan memaparkan apa yang seharusnya.

Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu akta Pendirian yang diterbitkan oleh Notaris berakibat hukum pada Surat Keputusan Pengangkatan cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, Perbuatan Tergugat III Mengatasnamakan dirinya Ketua STIE Panca Bhakti adalah Perbuatan Melawan Hukum dan juga tanggungjawab Notaris atas penerbitan akta yang dibatalkan tersebut lebih berupa tanggungjawab Moral seorang Notaris.

Kata kunci : Akta Perubahan Yayasan, Pembatalan Akta, Tanggungjawab Notaris.

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

PEMBATALAN AKTA PERUBAHAN YAYASAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN STUDI  
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NO. 527PK/PDT/2014 TERHADAP YAYASAN PANCA BHAKTI DI SULAWESI TENGAH

AGRINISARI PUTIKA, Hariyanto, S.H., M.Kn

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

## ABSTRACT

**ANNULMENT OF THE AMENDED DEED OF FOUNDATION  
BASED ON COURT DECISION  
(CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION  
NO. 527 PK/PDT/2014 ON PANCA BHAKTI FOUNDATION  
IN CENTRAL SULAWESI)**

By : Agrinisari Putika<sup>3</sup> dan Hariyanto<sup>4</sup>

This thesis aims to find out the legal consequences of the issuance of the deed of foundation of Panca Bhakti Foundation of Central Sulawesi and the Responsibility of the Notary Against the Establishment of the Amended Deed of the Foundation Number 02 Year 2004 which is deemed defective and has no legally binding force by the Supreme Court Decision Number : 527 PK/Pdt/2014.

This research is a normative juridical research using secondary data. Secondary data was obtained through library research by reviewing from primary, secondary, and tertiary law sources. The collected data were analyzed using qualitative method. This research is descriptive which describes what happened in the research location rather than explaining what should be.

Based on the research, it can be concluded that the deed of foundation issued by the Notary which resulted legally in the Appointment Decree is defected and has no binding force, the Act of Defendant III in the name of Dean of STIE Panca Bhakti is an Act Against the Law and also the responsibility of Notary on the issuance of the annulled deed is more of a Moral Responsibility of a Notary.

Keywords : Amended Deed of Foundation, Annulment of Deed, Responsibility of Notary.

---

<sup>3</sup>Student of Graduate Program of Master of Notary of Law Faculty of Gadjah Mada University

<sup>4</sup>Lecturer of Law Faculty of Gadjah Mada University